

**PENERAPAN *DISCREPANCY EVALUATION MODEL* DALAM EVALUASI PROGRAM
PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN SUNGAI MIAI 5 BANJARMASIN**

Alpha Ariani

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jalan A. Yani Km 5,5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin 70249

Abstract : The research aimed to evaluate the implementation of an inclusive education program in the elementary school. This research uses a qualitative approach, an evaluation method with a discrepancy evaluation model (DEM) which has four stages: design, installation, process, and results. Data collection techniques used observation, interviews, documentation studies, and questionnaires.

The results of the study show: 1) the program has not been designed according to criteria and standards; 2) there are many implementation of supporting resources that do not fit the criteria and standards; 3) implementation in the form of activities is still not optimal; and 4) program products do not reflect the achievement of the objectives of the program. Based on these findings, it is necessary to improvement, seriously, and increase as much as possible in all aspects so that services and learning in inclusive schools are more qualified.

Keywords : evaluation, inclusive education .

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan penuh kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini tercantum dalam UUD1945 pasal 31 ayat 1. Secara umum sistem pendidikan nasional diatur di dalam UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, dan pada pasal¹ 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang bermutu.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan bagian dari warga negara Indonesia sehingga juga perlu memperoleh pendidikan yang layak dan memadai, sebagaimana warga negara lainnya. Sejak sembilan tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan dan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, berdirilah sekolah-sekolah baru khusus bagi anak penyandang cacat yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun hingga saat ini SLB belum dapat menjangkau sampai ke pelosok negeri. Rata-rata hanya ada satu SLB di setiap kabupaten/kota sehingga jumlah dan daya tampungnya relatif terbatas, padahal ABK tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh

dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Layanan pendidikan bagi ABK secara khusus seperti di SLB disebut segregasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan dimana penyelenggaraan pendidikan bagi ABK terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak pada umumnya. Sistem pendidikan segregasi mengarah pada pola pendiskriminasian yang membuat suatu stigma yang sangat destruktif bagi konsep diri anak (Isabella, 2014:45). Permasalahan ini dapat berakibat pada kegagalan pendidikan nasional.

Pendidikan inklusif menjadi solusi dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Melalui sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Implementasi pendidikan inklusif dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah regular (SD, SMP, SMA, atau SMK). Pendidikan inklusif tidak hanya sekedar menempatkan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus

baik secara fisik, mental, emosional, sosial budaya dan ekonomi ke dalam sekolah, kelas regular maupun lingkungan belajar siswa normal tetapi lebih bagaimana memfasilitasi anak untuk berkembang, cara guru dan teman yang normal menyambut siswa yang memiliki kebutuhan khusus dengan baik dan siswa dapat mengenali nilai-nilai keberagaman sehingga akan membentuk pribadi dan watak yang berakhlak mulia. Dengan demikian pendidikan inklusif juga dapat menjadi salah satu cara dalam melaksanakan pendidikan karakter di Indonesia.

Namun demikian masih banyak kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, misalnya masih banyak sumber daya manusia (guru) yang pemahamannya minim tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus sehingga cenderung menolak keberadaan siswa tersebut (Kustawan, 2016:46-47). Demikian pula di kota Banjarmasin, walaupun sedang menunjukkan momentum untuk berkembang namun fakta di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang harus segera ditangani dan dibenahi bersama agar program yang telah diluncurkan tidak menjadi kontra produktif.

Berdasarkan hasil *grand tour* bahwa tidak sedikit sekolah yang menolak menerima ABK dengan alasan tidak memiliki sumber daya manusia yang memahami ABK, menganggap kehadiran ABK akan berdampak pada penilaian masyarakat tentang mutu sekolah, dan tidak mau repot menangani manajemen dan pengelolaan pendidikan inklusif yang kompleks sementara anggaran dari pemerintah masih belum jelas. Selain

itu, temuan di lapangan cukup banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tetapi masih sedikit yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK) dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah/dinas pendidikan provinsi yaitu sarjana (S1) Pendidikan Luar Biasa (*ortopedagog*). Kendala yang lain adalah jumlah siswa ABK yang diterima terlalu banyak sehingga rasio anak regular dan ABK lebih dari 10% dalam satu kelasnya. Selain itu, sarana prasarana umum yang aksesibel serta sarana prasarana khusus masih minim. Hal ini dikeluhkan kepala sekolah SDN-SN Sungai Maii 5 dan dimuat di media massa Banjarmasin Post (09 Desember 2017).

SDN-SN Sungai Maii 5 Banjarmasin merupakan satu dari dua puluh SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin. Selain itu juga merupakan piloting sekolah inklusif. Perubahan dari sekolah reguler menjadi inklusif menuntut sekolah untuk berbenah diri terutama berkaitan dengan manajemen sekolah agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai piloting sekolah inklusif akan menjadi patokan dan tolak ukur sekolah-sekolah inklusif lainnya oleh karena itu perlu dievaluasi sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya. Pentingnya evaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan sebagai kegiatan ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi praktis bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih kondusif dan bermutu.

B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN-SN Sungai Miai 5 Banjarmasin. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kesenjangan (*the discrepancy evaluation model*) untuk mengetahui kesenjangan (*discrepancy*) antara standar dengan kinerja pelaksanaan pada masing-masing komponen program. Oleh karenanya dikerucutkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut :

1. Desain program yang meliputi latar belakang kebutuhan program, dasar hukum, tujuan, sosialisasi sekolah inklusif, peserta didik, guru, sarana prasarana, biaya, kurikulum, pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi hasil belajar.
2. Instalasi program yang meliputi sosialisasi sekolah inklusif, penetapan sekolah inklusif, peserta didik, guru, sarana prasarana, biaya, dan kurikulum.
3. Proses pelaksanaan program yang meliputi aktivitas peserta didik, guru, proses pembelajaran, dan evaluasi/penilaian.
4. Produk yang merupakan hasil program.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus evaluasi dan sub-fokus evaluasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana desain program yang meliputi latar belakang kebutuhan program, dasar hukum, tujuan, sosialisasi sekolah inklusif, peserta didik, guru, sarana prasarana, biaya, kurikulum, pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi hasil belajar

dirancang agar sesuai dengan standar?

2. Bagaimana instalasi sumber daya pendukung yang meliputi sosialisasi sekolah inklusif, penetapan sekolah inklusif, peserta didik, guru, sarana prasarana, biaya, dan kurikulum diimplementasikan agar sesuai dengan standar?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program yang meliputi aktivitas peserta didik, guru, proses pembelajaran, dan evaluasi/penilaian agar sesuai dengan standar yang diharapkan?
4. Bagaimana produk program yang telah dicapai?

LANDASAN TEORI

A. Konsep Evaluasi Program

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2007:4), "*Evaluation is a process for giving attestations on such matters as reliability, effectiveness, cost-effectiveness, efficiency, safety, ease of use, and probity*". Pendapat Arikunto dan Jabar (2014:2) tentang evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya Arifin (2011:5) mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut di atas maka dapat disintesis bahwa evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan informasi tentang

kondisi nyata sesuatu hal, memberi arti, membandingkan dengan kriteria tertentu, dan kemudian mengkomunikasikan untuk dipergunakan dalam membuat keputusan tentang suatu kegiatan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih baik. Tujuan yang paling penting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan bahwa ada program yang dilaksanakan tetapi untuk memperbaiki program tersebut agar program itu benar-benar tercapai tujuannya.

Program merupakan turunan dari kebijakan atau operasionalisasi dari kebijakan untuk diimplementasikan dalam tindakan nyata. Thyer dan Padgett (2010:5), "*a program is an organized collection of activities designed to reach certain objectives*". Arikunto dan Jabar (2014:4) mengemukakan definisi program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Maka dapat disintesis bahwa program adalah suatu rangkaian aktivitas yang disusun secara terorganisir dan sistematis untuk mencapai tujuan sehingga permasalahan yang dihadapi terselesaikan.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2007:63), "*a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study*

and practice of program evaluation". Sedangkan menurut pendapat Mastrofin (2010:38), evaluasi program dilihat dari konteks dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi, berbagai isu, dan kendala yang ada dalam lingkungan program. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka evaluasi program adalah seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan suatu program. Melalui evaluasi program diharapkan mendapat informasi untuk pengembangan program tersebut di masa yang akan datang.

B. *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

Model Evaluasi Kesenjangan (*The Discrepancy Evaluation Model/DEM*) dikembangkan oleh Provus. Fokus evaluasi kesenjangan adalah membandingkan kinerja yang sesungguhnya (*performance*) dengan kinerja yang diharapkan oleh standar. Elemen-elemen kunci dalam model ini adalah S (*Standard*), P (*Performance*) untuk kinerja dan D (*Discrepancy*) merujuk dengan perbedaan antara standar dan kinerja aktual.

Melalui DEM, suatu program siap untuk dievaluasi melalui lima tahapan evaluasi yaitu *Design, Installation, Process, Product, dan Cost*. Setiap tahapan akan dilakukan perbandingan (*comparation*) antara realitas dengan standar (kriteria). Berhubung tahap 5, *cost* merupakan tahap pilihan, maka bisa saja dihilangkan.

Tahap pertama, *design*. Pada tahap ini suatu realitas, program *design*, dievaluasi apakah sesuai dengan kriteria struktural dan teoritis, pendapat

ahli, konsultan yang merupakan kriteria desain (standard). Dengan demikian peneliti mengevaluasi apakah desain program telah sesuai dengan kriteria desain (standard) sehingga dapat diketahui apakah desain program telah dirumuskan secara jelas dan memadai? Tahap kedua, *instalasi*. Pada tahap ini akan membandingkan antara program design (realitas program) dengan kriteria desain program (standard program). Peneliti menilai derajat tingkat instalasi sumber daya yang mendukung dibandingkan dengan standard program. Pertanyaan yang diajukan adalah “Apakah program dilaksanakan sebagaimana rumusan dalam tahap 1?” Tahap ketiga, *process*, yaitu menilai hubungan antara pelaksanaan/aktivitas program (*process*) dengan capaian sementara (*interim product*) program. Pertanyaan yang diajukan adalah “Apakah sumber daya dan teknik yang sedang digunakan sesuai dengan tujuan program?” Tahap keempat, *product*, yaitu mengevaluasi apakah realitas hasil akhir atau sasaran utama (*terminal product*) program telah dicapai sesuai dengan kriteria desain program (standard program). Pertanyaan yang diajukan adalah “Apakah sasaran hasil program tercapai di dalam implementasinya?” Tahap kelima, *Cost*, yaitu menganalisis biaya yang telah digunakan untuk program (*reality*) dengan keuntungan yang didapatkan (*cost-benefit analysis*). Hasil analisis inilah yang akan menentukan apakah program tersebut akan diteruskan atau diberhentikan; berkaitan dengan efisiensi program.

C. Pendidikan Inklusif

Makna pendidikan inklusif tidak hanya untuk anak yang memiliki kebutuhan fisik maupun mental tetapi

juga ditujukan untuk anak-anak yang mempunyai keberagaman seperti agama, gender, sosial ekonomi, bahasa, rasa, budaya bahkan anak berbakat. Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Inklusif diartikan sebagai usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006:45).

Inklusif memberikan kesempatan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang efektif di kelas regular bersama anak-anak normal. Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara yang komprehensif dalam bidang pendidikan untuk menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan anak-anak normal sehingga terjalin rasa saling menghormati.

Komponen dalam pendidikan inklusif meliputi peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pembiayaan. Berdasarkan permendiknas No. 70 tahun 2009 sasaran program ini adalah terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Peserta didik yang dimaksud meliputi tunanetra; khususnya *low vision*, tunarungu ringan, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif, berkesulitan belajar, autisme dan hiperaktif, memiliki gangguan motorik, dan tunaganda.

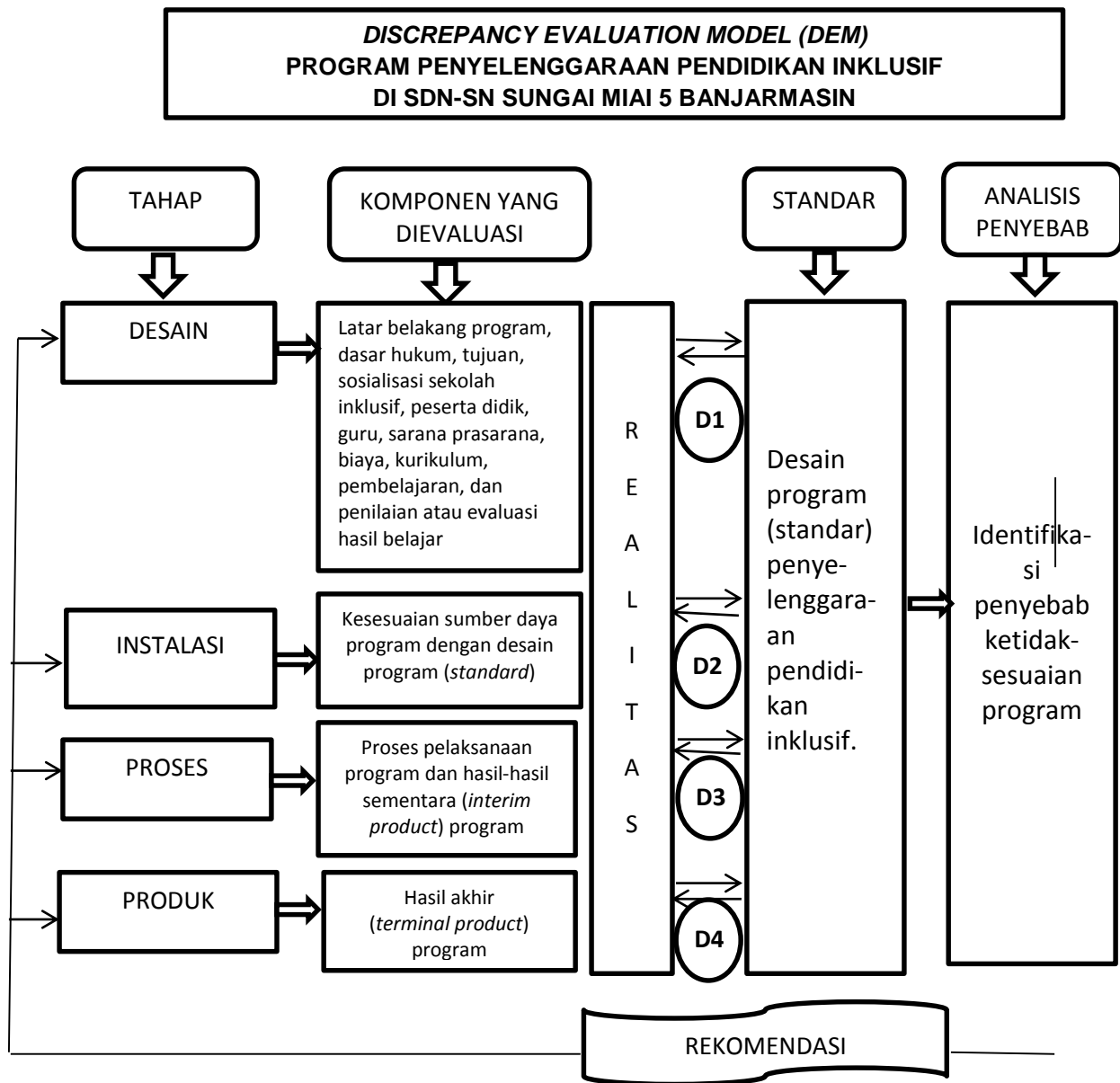
Sekolah melakukan identifikasi dan asesmen kepada semua peserta didik di sekolah dan hasilnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian dan pembiayaan sekolah.

Kurikulum untuk ABK yang digunakan di sekolah adalah kurikulum reguler, kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Pada hakekatnya semua sarana prasarana pendidikan di sekolah dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi ABK, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Sedangkan rancangan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya sama dengan rancangan anggaran pendidikan sekolah reguler.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode evaluasi dengan model evaluasi kesenjangan (*discrepancy evaluation model/DEM*) yang menerapkan empat tahapan yaitu desain, instalasi, proses, dan hasil. Penelitian dilakukan di SDN-SN Sungai Miai 5 Banjarmasin, dari Oktober 2017 sampai Maret 2018. Penetapan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa orang tersebut berkompeten, mengetahui dan mempunyai informasi yang akurat berkenaan dengan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Penunjukannya dengan melalui teknik bola salju (*snowball*), yaitu ketua FKPI (Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif), kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua siswa.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:404), bahwa aktivitas dalam analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Model evaluasinya digambarkan sebagai berikut:



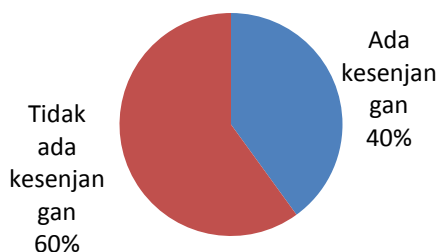
Gambar 1. Desain Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Tahap Desain

Pada tahap desain, yang dievaluasi adalah program penyelenggaraan pendidikan inklusif kota Banjarmasin dimana program tersebut akan diterapkan pada semua sekolah dasar di wilayah kota Banjarmasin, termasuk SDN-SN Sungai Miai 5. Setiap aspek dalam program dievaluasi berdasarkan kriteria dan standar yang telah dirumuskan sehingga diketahui kesenjangannya.

Evaluasi Tahap Desain



Gambar 2. Hasil Evaluasi Tahap Desain

Program penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum didesain sesuai dengan kriteria. Masih 40% dari aspek yang dievaluasi menunjukkan adanya kesenjangan. Aspek tersebut adalah latar belakang program yaitu terkait dengan analisa kebutuhan dan kajian pendahuluan yang mendasari dilaksanakan pendidikan inklusif, aspek sosialisasi sekolah inklusif, aspek peserta didik yaitu jenis & kriteria siswa ABK dan rasio siswa ABK dalam satu kelas, aspek guru khususnya pedoman rasio jumlah ABK yang didampingi GPK.

Sejak mendeklarasikan sebagai kota inklusif pada tahun 2013, kota Banjarmasin

bekerjasama dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) untuk mendata dan memetakan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Data hasil kerjasama tersebut menggambarkan di empat kelurahan hanya 35% ABK yang bersekolah baik di SLB maupun sekolah inklusif. Namun FKPI tidak mendokumentasikan data-data tersebut dan tidak dicantumkan dalam program. Program penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin sudah berdasarkan analisa kebutuhan bahwa diperlukan pendidikan inklusif namun belum didokumentasikan. Dinas Pendidikan Kota maupun FKPI juga tidak melakukan kajian pendahuluan sebelum menggulirkan program pendidikan inklusif.

Saat ini hakikat pendidikan inklusif masih belum dipahami secara baik dan menyeluruh oleh masyarakat. Oleh karenanya perlu dirancang suatu kegiatan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang layanan pendidikan inklusif dan akhirnya menerima keberadaan ABK di lingkungannya. FKPI tidak memiliki dokumen perencanaan kegiatan sosialisasi secara khusus dan terperinci. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada kesenjangan pada aspek sosialisasi sekolah inklusif.

Dalam program tidak dicantumkan dengan jelas kriteria ABK yang dapat diterima di sekolah inklusif. Sementara di lapangan ada pembatasan IQ (minimal 70) yang dapat diterima di sekolah inklusif, serta sosialisasi yang dilakukan oleh Kabid Pembinaan SD maupun Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui

media massa menyatakan bahwa sekolah inklusif dapat menerima ABK dengan kategori sedang dan disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit atau psikolog (Banjarmasin Post, 2017). Di dalam program juga tidak dicantumkan tentang aturan batas maksimal siswa ABK dalam satu rombongan belajar. Permendiknas hanya mencantumkan bahwa satuan pendidikan paling sedikit mengalokasikan kursi untuk siswa ABK adalah satu dalam satu rombongan belajar. Tidak mengatur batas maksimal dalam satu rombel. Namun di lapangan ada batasan maksimal jumlah siswa ABK dalam satu kelas (rombel) yaitu 10%. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada kesenjangan.

Perlu ada pengaturan tentang jumlah siswa ABK yang dapat didampingi oleh seorang GPK. Jumlah dan karakteristik siswa ABK harus menjadi perhatian dalam pembagian tugas pendampingan yang diberikan GPK. Jika terlalu banyak dan karakteristik kebutuhan siswa ABK tergolong sedang maka akan menjadi beban bagi GPK sehingga pendampingan yang diberikan tidak maksimal. Namun dari telaah dokumentasi tidak ditemukan aturan tentang hal ini. Dalam program juga tidak dicantumkan sehingga disimpulkan adanya kesenjangan.

Sedangkan aspek dasar hukum, tujuan program, pedoman system penerimaan dan asesmen, pedoman kualifikasi GPK, sarana prasarana, pembiayaan, kurikulum, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar tidak ditemukan adanya kesenjangan. Artinya telah sesuai dengan kriteria. Program ini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat mulai dari UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31, UU No. 4 Tahun 1997, Permendiknas No.70 Tahun 2009, Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2013, Pergub Kalimantan Selatan No. 065 tahun 2012, dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013. Berarti ada keterkaitan antara

peraturan pemerintah pusat hingga peraturan daerah.

Tujuan program pendidikan inklusif di kota Banjarmasin juga telah dirumuskan secara jelas dan memungkinkan untuk dicapai. Beberapa sekolah inklusif telah menunjukkan usaha dan semangatnya dengan menyelaraskan visi dan misinya sesuai dengan “nyawa” sekolah inklusif. Di dalam program dicantumkan system penerimaan dan assesmen siswa baru ABK. Assesmen dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Di dalam program penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dicantumkan kualifikasi minimum GPK yaitu lulusan S1 PLB.

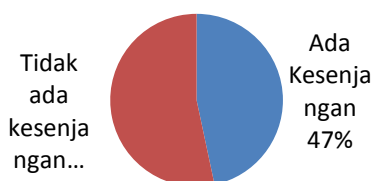
Pada dasarnya sarana prasarana, rancangan anggaran, dan kurikulum yang ada di sekolah umum juga dapat dipergunakan siswa ABK, hanya saja perlu penambahan dan penyesuaian. Aspek-aspek ini telah dicantumkan dalam program, namun dalam hal sarana prasarana masih belum dijelaskan secara terperinci tentang bangunan dan fasilitas minimal yang harus ada di sekolah inklusif seperti ketersediaan *ramp* bagi pengguna kursi roda, terdapat satu kloset duduk dalam jamban, kursi roda, tongkat, dan *handrail*.

Penyesuaian kurikulum untuk ABK juga sudah diatur dalam program. Jika siswa ABK memiliki potensi kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata dan mampu mengikuti materi pelajaran maka akan menggunakan kurikulum standar nasional. Apabila potensi kecerdasan di bawah rata-rata maka kurikulum standar nasional dapat diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya, dan jika tergolong cerdas istimewa maka digunakan kurikulum eskalasi.

B. Evaluasi Tahap Instalasi

Penerapan sumberdaya pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN-SN Sungai Miai 5 masih kurang. Beberapa aspek masih menunjukkan ketidaksesuaian (kesenjangan).

Evaluasi Tahap Instalasi



Gambar 3. Hasil Evaluasi Tahap Instalasi

Dalam proses penerimaan siswa baru ABK, sekolah tidak menerapkan asesmen. Keterbatasan keterampilan dan rasa kurang percaya diri dari GPK menjadi alasan tidak dilaksanakannya kegiatan ini. Padahal sekolah dapat bekerjasama dengan profesional seperti dokter, psikolog, orthopedagog, atau profesi spesifik lain untuk melaksanakan assesmen. Sekolah mensyaratkan hasil psikotes (IQ minimal 70) dalam proses pendaftaran siswa ABK baru. Berdasarkan surat keterangan tersebut dan observasi guru maka sekolah dapat memutuskan untuk menerima atau menolaknya.

Hanya 20% GPK yang berkualifikasi pendidikan S1 PLB. Padahal keterampilan untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar dapat bekerjasama dengan teman-teman lainnya, serta menumbuhkan tanggung jawab atas efisiensi seluruh proses pembelajaran di kelas dapat dibentuk melalui pembelajaran di universitas (Zulfija, 2013:549-554). Sulitnya mendapatkan GPK sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dikarenakan di Provinsi Kalimantan Selatan hanya satu perguruan tinggi; yaitu Universitas Lambung Mangkurat; yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa sehingga jumlah alumninya terbatas, sementara kebutuhan

akan GPK sangat tinggi. Solusi yang diambil sekolah adalah menerima sarjana dari berbagai macam jurusan namun harus di bidang pendidikan. Sekolah tidak memberikan pendampingan atau masa orientasi terlebih dahulu sebelum GPK mendampingi siswa ABK.

Sekolah tidak memiliki tim pengembang kurikulum. Sekolah juga tidak mewajibkan GPK menyusun program pembelajaran individual (PPI), padahal PPI berfungsi sebagai pedoman belajar yang disusun sesuai dengan kemampuan ABK sehingga proses belajar lebih terarah dan hasilnya lebih optimal. Yang diterapkan adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi dan diadaptasi sesuai kemampuan siswa ABK dengan cara menurunkan, mengurangi atau mengganti materi belajar agar sesuai dengan kemampuannya namun tidak didokumentasikan.

Sarana prasarana umum sekolah sudah lengkap dan dalam kondisi baik serta rapih. Namun masih belum memiliki aksesibilitas untuk kebutuhan anak cacat dan ABK. Belum ada *ramp*, *handrail*, kloset duduk, maupun kursi roda. Sarpras khusus ABK sudah ada namun pemanfaatannya masih belum optimal. Dalam segi pembiayaan, walaupun sekolah mewajibkan setiap ABK membantu dalam jumlah yang sama yaitu Rp 500.000,- per bulan, namun hanya cukup untuk membiayai gaji GPK. Bantuan dari orangtua tersebut masih belum cukup untuk membiayai pengembangan sekolah inklusif.

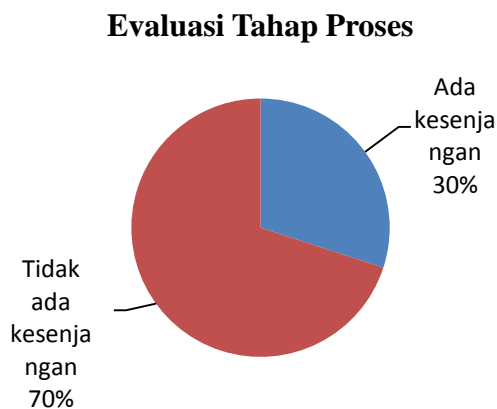
Aspek-aspek lain seperti sosialisasi sekolah inklusif, penetapan sebagai sekolah inklusif, rasio siswa ABK dan reguler dalam satu kelas, dan rasio jumlah ABK yang didampingi seorang GPK sudah sesuai dengan standar, dengan kata lain tidak ada kesenjangan. Kepala sekolah selalu mensosialisasikan keberadaan siswa ABK kepada siswa, guru, maupun orangtua siswa.

Pahlawan

Sekolah juga menerapkan secara ketat pengaturan pendampingan. Seorang GPK hanya mendampingi satu siswa ABK, dan maksimal jumlah siswa ABK dalam satu kelas hanya 10% dari jumlah siswa keseluruhan di kelas tersebut. Kondisi ini membuat GPK mampu fokus dan maksimal dalam memberikan pendampingan. Proses belajar mengajar di kelas juga kondusif.

C. Evaluasi Tahap Proses

Aktivitas atau kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa aspek yang menunjukkan adanya kesenjangan; artinya masih belum sesuai kriteria.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Tahap Proses

Peran dan tugas GPK dalam menyelenggarakan administrasi khusus antara lain adalah membuat catatan perkembangan anak. Catatan perkembangan anak merupakan catatan harian siswa terkait perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas maupun diluar kelas serta kemampuan yang sudah dicapai. Seluruh GPK tidak melakukan dikarenakan sekolah; dalam hal ini kepala sekolah; tidak mewajibkan untuk membuatnya. Padahal catatan ini dapat membantu GPK ketika akan membuat laporan perkembangan anak di akhir semester

Dalam aktivitas belajar mengajar di kelas, ada 64% guru kelas yang

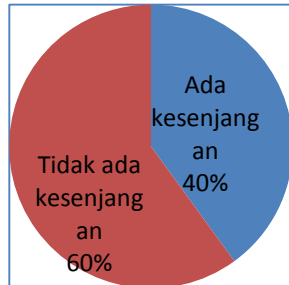
menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi dan hanya 18% GPK yang membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ABK yang didampinginya. Selain itu ada 84,3% guru kelas yang menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik siswa. Hal ini perlu terus didorong dan ditingkatkan mengingat pemanfaatan media pembelajaran dan penerapan metoda yang tepat dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, mempermudah pemahaman materi, dan mengaktifkan siswa sehingga hasil belajar lebih optimal.

Aspek lain seperti penerimaan terhadap keberadaan siswa ABK, pelibatan siswa ABK dalam kegiatan sekolah, koordinasi antara GPK dengan guru kelas atau orangtua siswa ABK, penggunaan bahasa yang sederhana dalam proses belajar mengajar, penilaian hasil belajar yang fleksibel serta penghargaan terhadap prestasi siswa menunjukkan tidak adanya kesenjangan.

D. Evaluasi Tahap Produk

Evaluasi terhadap produk program penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah mengacu pada tujuan program yaitu 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 2) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keragaman, tidak diskriminatif dan pembelajaran yang ramah terhadap semua peserta didik; 3) menuntaskan wajib belajar sembilan tahun bagi semua peserta didik; 4) anak berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan di dekat tempat tinggalnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada tujuan program yang belum tercapai.

Evaluasi Tahap Produk



Gambar 5. Hasil Evaluasi Tahap Produk

Masih adanya kesenjangan pada tahap desain, instalasi, maupun proses berakibat pada pencapaian tujuan program atau produk. Masih belum maksimalnya perkembangan perilaku akademik (39%), emosi (50%), sosial (89%), dan kemandirian (42%) siswa ABK menjadi indikator belum tercapainya pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Perkembangan yang tampak paling menonjol adalah aspek sosialnya. Hal ini seiring dengan telah diterimanya keberadaan siswa ABK dengan segala keterbatasan dan kebutuhannya oleh seluruh warga sekolah. Sekolah telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keragaman, tidak diskriminatif dan pembelajaran yang ramah terhadap semua peserta didik. Sekolah juga telah mendukung ketercapaian penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan ABK dapat menempuh pendidikan di dekat tempat tinggalnya. Pencapaian ini berkaitan dengan semangat yang tinggi dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai sehingga nantinya mandiri dan siap terjun di lingkungan sosial. Dari pihak dinas pendidikan dan sekolah juga memiliki semangat yang sama untuk mendorong

masyarakat menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan pembahasana yang telah diuraikan, maka hasil evaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desain program belum dirancang sesuai kriteria atau standar. Beberapa aspek masih belum ada kejelasan pengaturannya sehingga berdampak pada implementasi yang beragam di sekolah-sekolah inklusif, termasuk di SDN-SN Sungai Miai 5.
2. Instalasi program menunjukkan bahwa beberapa aspek masih belum diimplementasikan sesuai standar. Input dan pemanfaatan sumberdaya pendukung masih belum maksimal. Sekolah belum menerapkan proses asesmen, GPK tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui training, pelatihan atau pendampingan GPK senior sebelum terjun langsung mendampingi siswa ABK, tidak ada PPI sehingga membawa dampak pada proses pembelajaran yang kurang terarah, ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel motorik masih sangat terbatas, dan keterbatasan pendanaan sehingga sekolah masih belum mampu merencanakan pengembangan, karena masih harus memenuhi kebutuhan rutin operasional.
3. Aktivitas belajar mengajar masih belum optimal. Beberapa aspek masih belum sesuai standar. GPK tidak membuat catatan khusus perkembangan anak, dan guru belum semuanya menerapkan metoda pembelajaran yang variatif serta memanfaatkan media pembelajaran sehingga kurang memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai karakteristiknya.

4. Beberapa sumber daya program dan aktivitas yang belum terimplementasikan sesuai standard membuat hasil program (produk) kurang bermutu, yaitu kurang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK sehingga perkembangan akademik, emosi, sosial dan kemandirian tidak mencapai standar yang ditetapkan.

Saran

Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah FKPI bersama dinas pendidikan kota Banjarmasin perlu meninjau ulang program penyelenggaraan pendidikan inklusif agar lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dijadikan acuan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Selain itu juga menggalakan pelaksanaan bimbingan teknik, pelatihan, workshop, seminar yang materinya bukan hanya pengenalan ABK namun lebih pada penyelenggaraan administrasi khusus seperti penyusunan program pembelajaran individual (PPI), cara membuat catatan khusus perkembangan anak, maupun cara memberikan intervensi sehingga perkembangan anak optimal dan sumber daya manusia di sekolah juga senantiasa meningkat mengingat masih banyak GPK yang tidak berkualifikasi S1 PLB. Disisi lain, sekolah mendorong guru kelas, guru mata pelajaran, dan GPK aktif mengikuti kegiatan tersebut.

Sekolah hendaknya melaksanakan asesmen bagi siswa ABK baru karena melalui asesmen maka akan diketahui apa yang menjadi kelebihan dan kebutuhan dari setiap siswa ABK sehingga dapat dirancang suatu program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya.

Pemerintah hendaknya mulai memperhatikan keberadaan GPK di sekolah sehingga dapat dihargai hak-haknya seperti guru kelas atau guru mata pelajaran. Hal ini karena kehadiran GPK diperlukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran agar proses pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif.

Penghargaan akan hak tersebut antara lain adalah pemberian gaji sehingga sekolah dapat memfokuskan pada usaha melengkapi sarana prasarana yang aksesibel, sarana prasarana khusus ABK, dan untuk pengembangan sekolah inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2011. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Banjarmasin Post, *Proposal Rusmalina Tak Direspons: Sekolah Inklusi Masih Kurang Perhatian*, 09 Desember 2017.
- Banjarmasin Post. (2017). Anak Difabel Ditolak Sekolah Inklusi: Ketua PDDI Luapkan Kekesalan, Kategori Ringan Bisa Masuk.
- Isabella, Paramita; Emosda; Suratno. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi*. Jurnal Tekno-Pedagogi Vol. 4 No. 2 September 2014.
- Kustawan, Dedy. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif: Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum & Kejuruan*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Mustrofin 2010. *Evaluasi Program*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua*, terjemahan Denis, Ny. Enrica. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Stufflebeam, Daniel L. & Anthony J. Shinkfield. 2007. *Evaluation Theory: Models & Applications*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Thyer, Bruce A. and Padgett, Deborah K. 2010. *Program Evaluation: An Introduction*. Belmont, CA: Cengage Learning.
- Zulfija, Movkebaieva; Indira, Oralkanova; Elmira, Uaidullakzy. 2013. *The professional competence of teachers in inclusive Education*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 89.